

LAPORAN LHKPN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JUMLAH LAPORAN	NRK	TAHUN LAPOR
1	Dwi Widiastuti	Lurah	Kelurahan Setu	1	118766	2025
2	Riswanto	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Setu	1	178045	2025
3	Resti Poerwaningsih	Kasi Kesra	Kelurahan Setu	1	163556	2025
4	Masih	Kasi Ekbang	Kelurahan Setu	1	117385	2025



III. HUTANG

Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.043.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI WIDIASTUTI
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 217814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.999.750.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/35 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 386.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/118 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 985.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 895.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 249.250.000		
5. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 564.500.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 752.000.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 168.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.073.650.000



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RISWANTO
- Jabatan** : SEKRETARIS KELURAHAN
- NHK** : 757360

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **630.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **256.000.000**

- MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000
- MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **26.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.535.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **914.035.000**

III. HUTANG **Rp.** **966.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **-51.965.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.